Ekonomi Indonesia pada beberapa tahun terakhir ini berdasarkan data dari BPS, mengalami pertumbuhan yang signifikan. Namun di sisi lain, pendapatan perkapita masyarakat Indonesia dinilai masih rendah jika dibandingkan dengan negara negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand. Selain itu, masih terdapat kesenjangan ekonomi yang sangat tinggi antara masyarakat miskin di pedesaan dan perkotaan. Seperti yang kita ketahui bahwa kesenjangan ekonomi antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang, serta antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin merupakan salah satu faktor yang menyebabkan krisis ekonomi dunia pada tahun 2008 dan 2009.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut negara perlu merancang sebuah konsep strategi yang mencakup pertumbuhan ekonomi dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat agar dapat menikmati manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Salah satu upaya dunia dalam mengembangkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan disepakatinya G20 *Principle for Financial Inclusion* (9 *principles*) pada Toronto Summit pada tahun 2010, yaitu *leadership, diversity, innovation, protection, empowerment, cooperation, knowledge, proportionality* dan *framework*. Prinsip-prinsip yang dibentuk ini akan memfokuskan kegiatan G20 pada inklusi keuangan sebagai jawaban atas dampak krisis tahun 2008 pada negara-negara berkembang yang memiliki masyarakat *unbanked* cukup besar.

Inklusi keuangan sendiri merupakan pernyataan dimana orang dewasa memiliki akses terhadap kredit, tabungan, pembayaran, dan asuransi dari penyedia layanan jasa keuangan resmi dengan biaya yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Seperti yang dijelaskan oleh *Consultative Group to Assist the Poor* (CGAP) :

“*State in which all working age adults have effective access to credit, savings, payments, and insurance from formal service providers. Effective access involves convenient and responsible service delivery, at a cost affordable to the customer and sustainable for the provider, with the result that financially excluded customers use formal financial services rather than existing informal options.*” (CGAP-GPFI).

Menurut Bank Dunia, inklusi keuangan juga memiliki penjelasan bahwa seorang individu atau pegusaha bisnis maupun orgnanisasi memiliki akses pada produk dan layanan keuangan yang bermanfaat dan terjangkau untuk memenuhi kebutuhan mereka seperti transaksi, pembayaran, tabungan, kredit dan asuransi yang digunakan dengan tanggung jawab penuh dan berkelanjutan.

Inklusi keuangan diharapkan mampu mengentaskan kemiskinan dan meminimalisir kesenjangan ekonomi suatu negara. Beberapa literatur yang membahas mengenai penguatan sektor keuangan memiliki hubungan yang signifikan dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Khasnobis dan Mavrotas (2008) mengatakan bahwa mobilisasi yang efektif dari tabungan dalam negeri untuk investasi swasta memainkan peran kunci dalam mencapai pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan. Oleh karena itu sebuah sistem keuangan yang efisien dan inklusif akan memberdayakan individu, memfasilitasi pertukaran barang dan jasa, mengintegrasikan masyarakat dengan perekonomian serta memberi perlindungan terhadap guncangan ekonomi.

Bank dan lembaga keuangan memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendorong peningkatan inklusi keuangan, melalui pengembangan branchless banking dan peningkatan *financial literacy* melalui sosialisasi. Peranan perbankan menguasai industri keuangan dan diharapkan ikut membantu peningkatan kualitas layanan keuangan masyarakat sehingga dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Saat ini bank sedang marak melakukan inovasi baru yang dikembangkan untuk menciptakan layanan keuangan atau perbankan menjadi lebih baik dan efisien karena memanfaatkan kehadiran teknologi.

Terlebih saat ini banyak bermunculan produk produk layanan keuangan digital yang kita kenal dengan *fintech*. *Financial Technology* atau yang biasa kita kenal dengan sebutan fintech yaitu sebuah inovasi pada sektor finansial dengan sentuhan teknologi modern sebagai penghubung antara penyedia jasa finansial dengan pengguna atau masyarakat umum. Fintech secara umum merupakan industri baru di sektor ekonomi.

Fintech memiliki potensi untuk memfasilitasi peningkatan inklusi keuangan dengan meningkatkan akses ke layanan keuangan bagi individu dan bisnis yang telah dikeluarkan dari pasar keuangan formal. Perusahaan-perusahaan Fintech sedang mengembangkan layanan digital yang dapat menghasilkan miliaran orang yang memiliki akses lebih besar ke sektor perbankan dan produk-produk investasi baru. Inovasi digital di berbagai bidang di sektor keuangan memiliki dampak yang luar biasa dalam meningkatkan penyediaan layanan keuangan. Secara khusus, teknologi digital telah menyebar dengan cepat di banyak bidang ekonomi global, namun ada potensi untuk peningkatan penggunaan teknologi ini.

Untuk mendukung penyebaran teknologi keuangan digital, G20 telah mengadopsi Prinsip Tingkat Tinggi untuk Inklusi Keuangan Digital (2016) yang sangat menekankan pada penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan inklusi keuangan. Prinsip-prinsip menekankan menemukan keseimbangan yang tepat antara inovasi dan risiko dalam mencapai inklusi keuangan yang lebih besar dan bagaimana memanfaatkan kerangka kerja hukum dan peraturan untuk menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan inklusi keuangan. Ini melibatkan pembentukan praktik keuangan digital yang bertanggung jawab untuk melindungi konsumen dan untuk meningkatkan literasi keuangan dan kesadaran sehingga produk keuangan digital lebih baik dipahami oleh pengguna.

*Fintech* pada perbankan akan membantu menciptakan nilai tambah bagi bank tersebut dan meningkatkan daya saing melalui *customer value propositions* yang lebih baik, meningkatkan responsibiliti dan memberikan layanan serta menumbuhkan hubungan yang lebih baik dengan nasabah.

Bank saat ini berada dimasa transformasi digital, berusaha untuk untuk mempersingkat waktu agar mereka bisa masuk ke pasar untuk memberikan nilai atau jasa baru kepada nasabahnya. Institusi perbankan di wilayah ASEAN yang berhasil menunjukkan peningkatan pangsa pasar adalah mereka yang melakukan investasi dalam teknologi digital, yang dinyatakan dalam Riset McKinsey and Company.

Inovasi pada layanan digital menjadi asumsi bahwa kebutuhan teknologi pada layanan digital sudah menjadi bagian dasar dalam kehidupan sehari-hari bagi setiap individu, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan di negara-negara berkembang. Layanan keuangan digital menyediakan sarana untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dan mampu memberikan berkontribusi yang baik terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan inklusi keuangan (*Asian Development Bank*, 2016). Keuangan digital telah secara internasional dianggap sebagai sarana yang memadai untuk memberikan peluang untuk mempromosikan inklusi keuangan melalui pengurangan biaya penyediaan layanan ini (*Asian Development Bank*, 2016).

Menurut research yang di lakukan oleh Dayadhar (2015) bahwa selama beberapa tahun terakhir, beberapa negara bagian Afrika telah mengalami kemajuan yang pesat dalam pertimbangan moneter dengan memanfaatkan manajemen keuangan yang terkomputerisasi. Di Kenya, layanan keuangan digital telah menjadi sebuah solusi dalam mengatasi kesulitan ekonomi. Hal ini tercermin dari meningkatnya jumlah kredit yang masuk di perbankan Kenya.

Di Asia memiliki posisi perekonomian yang baik untuk pertumbuhan yang kuat, dengan jumlah PDB diperkirakan akan naik rata-rata 6,3% dalam setiap dua tahun ke depan. Pasar negara berkembang di Asia juga menunjukkan performa terbaik dalam pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir, terutama bila dibandingkan dengan pasar negara berkembang di luar Asia.

Tetapi untuk memastikan pertumbuhan ini adil dan inklusif, para pemimpin bisnis Asia, akademisi dan pembuat kebijakan perlu menghadapi sejumlah tantangan, termasuk populasi “*unbanked*” dan “*underbanked*” yang signifikan. Lebih dari 1 miliar orang di kawasan ini masih belum memiliki akses ke layanan keuangan formal yang mengartikan tidak memiliki pekerjaan formal, tidak memiliki rekening bank, tidak memiliki kemampuan untuk terlibat dalam perdagangan.

Penerapan kebijakan keuangan inklusif di Indonesia sangat relevan dalam mendukung efektivitas dari fungsi dan tugas Bank Indonesia dari sisi moneter, sistem pembayaran dan makroprudensial. Keuangan inklusif membantu menurunkan tekanan likuiditas dan rsiko kredit di sektor perbankan. Dengan adanya keuangan inklusif memungkinkan terbukanya pasar retail baru khususnya kredit mikro dan kecil sehingga membantu diversifikasi portofolio dan meminimalisasi risiko kredit. Selain itu program keuangan inklusif juga dapat membantu dalam meningkatkan kapabilitas masyarakat dan menumbuhkan responsible finance melalui edukasi keuangan dan perlindungan konsumen. Dengan adanya kebijakan keuangan inklusif, juga mampu meningkatkan efektivitas kebijakan moneter yang sudah ada sehingga mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Kehadiran fintech diharapkan mampu merangsang pertumbuhan ekonomi masyarakat dan mendorong pertumbuhan inklusi keuangan. Fintech juga berperan penting dalam menjangkau lapisan masyarakat Indonesia di pedesaan sekalipun yang selama ini belum merasakan layanan keuangan, atau belum terjangkau oleh perbankan. Menurut Leora Klapper, selaku Led Economist in the Finance and Private Sector Research Team of the Development Research Group dari Bank Dunia, kemajuan dalam layanan keuangan digital, dimulai dari pembayaran digital, termasuk tabungan, kredit dan produk asuransi yang disampaikan melalui patform digital, merupakan kunci dalam mencapai inklusi keuangan.